

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019**

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

##### **1. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019.

##### **2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Kinerja**

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja/indikator kinerja Utama Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Renstra.

Hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja yang mencerminkan kinerja Perangkat Daerah selama Tahun 2019, dan diuraikan secara detail dalam rincian kinerja. Hasil Pengukuran Kinerja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**TABEL 3.1**  
**SKALA PENGUKURAN KINERJA**

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3
1	Capaian 100,00 %	Memuaskan
2	86,00% < capaian < 99,99%	Sangat baik
3	70,00% < capaian < 85,99%	Baik
4	55,00 % < capaian < 69,99 %	Cukup
5	Capaian < 54,99 %	Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai fungsi pendukung urusan Pemerintahan Umum Bidang Kepegawaian dan Diklat untuk pencapaian indikator kinerja sasaran RPJMD maupun indikator kinerja sasaran Perangkat Daerah sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

Pada RPJMD Tahun 2018-2023 BKPSDM Kabupaten Temanggung mengemban amanah untuk tercapainya 1 indikator sasaran RPJMD yang menjadi indikator tujuan bagi BKPSDM yaitu Indeks Profesionalisme ASN.

Indikator sasaran RPJMD yang menjadi tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.2  
PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumah Indikator Kinerja
1	Memuaskan		
2	Sangat baik	1	1
3	Baik		
4	Cukup		
5	Kurang	-	
Jumlah		1	1

Pencapaian kinerja sasaran terinci dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 3.3  
PENCAPAIAN SASARAN

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	1	51,7	
Jumlah		1	51,7	

Adapun untuk pencapaian indikator sasaran RPJMD Tahun 2018 - 2023 BKPSDM didukung dengan pencapaian indikator sasaran Perangkat daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4  
PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

NO.	SASARAN	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	Keterangan:
1.	Terkelolanya administrasi kepegawaian	3	84,75	Sangat baik
2.	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4	91,83	Sangat baik
3.	Meningkatnya kualitas pembinaan, kesejahteraan aparatur dan informasi kepegawaian	3	100	Sangat baik
4.	Pendukung Pencapaian Indikator Urusan Perangkat Daerah	3	100	Sangat baik

Berikut adalah tabel untuk mengukur capaian indikator kinerja sasaran RPJMD dan indikator kinerja sasaran Program Perangkat Daerah

Tabel 3.5  
Sasaran RPJMD dan sasaran program BKPSDM Tahun 2019

No	Indikator Sasaran/Program	Satuan	Capaian 2018	Tahun 2019		Capaian kinerja Th 2019	Renstra Tahun 2019-2023		Capaian kinerja Renstra Th 2019
				Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2019	
<b>1.</b>	<b>Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan</b>					<b>100</b>			<b>84,75</b>
	Indek Profesionalisme ASN	angka	46	49	51,7	100	61	51,7	84,75
<b>2.</b>	<b>Terkelolanya administrasi kepegawaian</b>					<b>100</b>			<b>100</b>
a	Persentase penyusunan formasi pegawai	%	100	100	100	100	100	100	100
b	Persentase penyelesaian usulan pensiun PNS tepat	%	100	100	100	100	100	100	100

	waktu								
c	Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat tepat waktu	%	99,81	100	100	100	100	100	100
<b>3.</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>					<b>99,21</b>			<b>91,83</b>
a	Persentase pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang memiliki kompetensi diklat kepemimpinan	%	35,63	37,6	37,91	100	50,5	37,9 <sub>1</sub>	75,07
b	Persentase ASN yang memenuhi kompetensi Diklat teknis dan fungsional	%	10	3	4,87	100	4,5	4,87	100
c	Persentase keterisian jabatan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas	%	95,17	80	77,48	96,85	80	77,4 <sub>8</sub>	96,85
d	Persentase perempuan pada jabatan eselon I, II, III, dan IV	%	44,79	45,5	45,81	100	48	45,8 <sub>1</sub>	95,43
<b>4.</b>	<b>Meningkatnya kualitas pembinaan, kesejahteraan aparatur dan informasi kepegawaian</b>					<b>91,11</b>			<b>100</b>
	Persentase pelanggaran disiplin ASN	%	0,17	0,3	0,22	73,33	0,2	0,22	100
	Persentase penyelesaian penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN	%	100	90	100	100	90	100	100
	Persentase pelaksanaan updating data kepegawaian	%	100	80	100	100	95	100	100

Secara umum capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah rata-rata tercapai 95,65% dengan kategori **sangat baik**, namun demikian terdapat 1

(satu) indikator sasaran program yang realisasinya pada tahun 2019 tidak mencapai target tahun berkenaan yaitu Persentase realisasi capaian Persentase keterisian jabatan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas, yang terealisasi sebesar 77,48 % lebih rendah 2,52% dari yang ditargetkan sebesar 80%. Hal ini disebabkan karena Gagalnya seleksi pengisian JPT eselon IIa, dan belum dilantiknya pejabat Jabatan Pimpinan tinggi Pratama hasil Seleksi JPT eselon IIb Tahun 2019 di akhir bulan Desember 2019 yang berimbas pada belum adanya pengisian jabatan eselon III dan IV.

Secara rinci Faktor pendorong dan penghambat tercapainya realisasi indikator sasaran BKPSDM Tahun 2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.6  
Faktor pendorong dan penghambat  
capaian kinerja sasaran BKPSDM Tahun 2019

No	Indikator Sasaran/Program	Kinerja Tahun 2019		Faktor Pendorong	Faktor penghambat
		Target	Realisasi		
1.	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan				
a	Indek Profesionalisme ASN	49	51,7	Update data kepegawaian yang dilakukan oleh pengelola kepegawaian di OPD dan  Meningkatnya jumlah responden/ PNS yang mengisi data IP (dari 1479 orang di th. 2018 menjadi 1.738 orang di tahun 2019)	Belum semua PNS mengisi data IP (baru 26%)
2.	Terkelolanya administrasi kepegawaian				
a	Persentase penyusunan formasi pegawai	100	100	Menyusun Formasi Kepegawaian merupakan kewajiban OPD.	
b	Persentase penyelesaian usulan pensiun PNS tepat waktu	100	100	Semakin Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kenaikan Pangkat di BKN dan terjalannya Kerjasama dan	

				kinerja yang baik antar pengelola kepegawaian tingkat kabupaten maupun OPD	
c	Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat tepat waktu	100	100	Koordinasi yang intensif dan baik dengan BKN selaku pemberi persetujuan teknis dan verifikator Administrasi usulan kenaikan pangkat PNS dan terjalannya Kerjasama dan kinerja OPD Pengusul berkas kenaikan pangkat PNS yang tepat waktu	
3.	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
a	Persentase pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang memiliki kompetensi diklat kepemimpinan	37,6	37,91	Rencana Pengukuran target Kinerja yang realistis dengan kemampuan keuangan yang ada.	
b	Persentase ASN yang memenuhi kompetensi Diklat teknis dan fungsional	3	4,87	Tawaran keikutsertaan Diklat Teknis/Fungsional tidak hanya dari Badan Diklat Provinsi Jateng (BPSDMD) akan tetapi juga dari instansi vertikal penyelenggara diklat, dan  Tingginya keikutsertaan PNS untuk mengikuti diklat komputer (materi : Aplikasi CAT UKPPI)	
c	Persentase keterisian jabatan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas	80	77,48		Gagalnya seleksi pengisian JPT eselon IIa, dan belum dilantiknya pejabat JPT hasil Seleksi JPT eselon IIb th. 2019 di akhir bulan Desember 2019 yang berimbas pada belum adanya pengisian jabatan eselon III dan IV
d	Persentase perempuan pada jabatan eselon I, II, III, dan IV	45,5	45,81	Makin terbuka dan meningkatnya kompetensi perempuan untuk menjabat eselon II, III, dan IV.	
4	Meningkatnya				

	kualitas pembinaan, kesejahteraan aparatur dan informasi kepegawaian				
a	Persentase pelanggaran disiplin ASN	0,3	0,22	Tidak tercapainya target ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kepatuhan ASN/PNS terhadap Peraturan Perundang-undangan Bid. Kepegawaian ( indicator negative)	
b	Persentase penyelesaian penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN	90	100	Kasus terjadi dan dapat segera diselesaikan pada th. 2019 dan Atasan langsung segera menindaklanjuti atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh bawahannya	
c	Persentase pelaksanaan updating data kepegawaian	80	100	Kinerja Pengelola Kepegawaian OPD yang konsisten mengirimkan update data kepegawaiannya ke BKPSDM	

## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

### 1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung, pada tahun anggaran 2019, didukung dengan Anggaran sebesar Rp. 10.296.365.444,- (Sepuluh milyar dua ratus Sembilan puluh enam juta empat ratus empat puluh empat rupiah) bersumber dari APBD. Realisasi anggaran sejumlah Rp. 9.131.878.040,- (Sembilan milyar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu empat puluh rupiah). Secara ringkas komposisi realisasinya sebagai berikut :

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG, sebesar Rp4.199.500.617,00
2. BELANJA LANGSUNG, sebesar Rp5.952.569.114,00

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7  
 Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian  
 dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Temanggung Tahun 2019

No	Indikator Sasaran/ Program	Program/kegiatan	Pagu (Rp)	Triwulan IV	
				Realisasi	%
<b>1.</b>	<b>Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan</b>				
	Indek Profesionalisme ASN				
<b>2.</b>	<b>Terkelolanya administrasi kepegawaian</b>		<b>518.963.500</b>	<b>183.392.697</b>	<b>35,33%</b>
	Persentase penyusunan formasi pegawai	Penerbitan KARIS/KARSU, KARPEG DAN SK PENSIUN	24.140.000	20.989.500	86,94%
	Persentase penyelesaian usulan pensiun PNS tepat waktu	Pengelolaan administrasi kepegawaian	4.500.000	1.430.000	31,78%
	Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat tepat waktu	Fasilitasi uji kesehatan bagi PNS yang sakit berkelanjutan	24.479.000	12.658.755	51,71 %
		Fasilitasi Penyusunan SKP/P2KP	9.729.000	2.283.500	23,47%
		Seleksi Penerimaan CPNS	359.445.500	90.945.942	25,30%
		Fasilitasi uji kompetensi jabatan fungsional	32.587.000	11.653.000	35,76%
		Pengangkatan PNS	6.967.000	1.421.000	20,39%
		Penyusunan Formasi Pegawai	23.371.000	10.782.000	46,13%
		Penataan Sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	33.745.000	31.229.000	92,54%
<b>3.</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>4.630.675.300</b>	<b>4.106.602.570</b>	<b>88,68%</b>
	Persentase pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang memiliki kompetensi diklat kepemimpinan	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS Daerah	2.661.888.000	2.413.820.174	90,68 %
	Persentase ASN	Pendidikan dan	384.466.200	280.337.234	72,91

	yang memenuhi kompetensi teknis dan fungsional Diklat dan	Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah			%
	Persentase keterisian jabatan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas	Orientasi PNS	28.974.800	27.514.276	94,95 %
	Persentase perempuan pada jabatan eselon I, II, III, dan IV	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis	179.207.000	155.675.333	86,86%
		Pendidikan Penjurangan struktural	490.492.000	490.089.000	99,92 %
		Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	49.279.000	47.230.972	95,84 %
		Penyelenggaraan Assesment	135.617.000	129.599.137	95,56 %
		Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	9.804.000	8.304.000	84,7 %
		Seleksi Calom Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	677.273.800	542.264.944	80,06 %
		Pengambilan Sumpah Pelantikan dan Penyerahan SK	13.673.500	11.767.500	86,06 %
<b>4.</b>	<b>Meningkatnya kualitas pembinaan, kesejahteraan aparatur dan informasi kepegawaian</b>		<b>142.995.864</b>	<b>131.328.657</b>	<b>91,84%</b>
	Persentase pelanggaran disiplin ASN	Pemberian Penghargaan bagi PNS berprestasi	5.085.896	4.960.400	97,53 %
	Persentase penyelesaian penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN	Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	29.279.968	23.599.729	80,60 %
	Persentase pelaksanaan updating data kepegawaian	Penanganan proses ijin perceraian bagi PNS	10.302.984	8.658.700	84,04 %
		Pengelolaan aplikasi kepegawaian	9.619.900	8.376.900	87,07 %
		Pemeliharaan sistem	23.799.416	21.604.000	90,77

		informasi kepegawaian			%
		Operasional Pembuatan ID Card	43.168.000	43.130.123	99,91 %
		Sosialisasi Peraturan Perundang undangan Bidang Kepegawaian	12.044.000	12.027.105	99,86 %
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundang undangan Bidang Kepegawaian	9.695.700	8.971.700	92,53 %

### Pendukung Sasaran

No	Indikator Sasaran/ Program	Program/kegiatan	Pagu (Rp)	Triwulan IV	
				Realisasi	%
<b>1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>		<b>4.343.796.330</b>	<b>4.199.500.617</b>	<b>96,68 %</b>
	a. Gaji dan tunjangan		2.842.196.330	2.780.976.417	97,84 %
	a. Tunjangan		1.501.600.000	1.418.524.200	94,47 %
<b>2.</b>	<b><i>Tersusunnya dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan</i></b>		<b>4.754.000</b>	<b>4.196.750</b>	<b>88,27 %</b>
		Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen Pelaporan	4.754.000	4.196.750	88,27%
<b>3.</b>	<b><i>Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran</i></b>		<b>425.351.500</b>	<b>340.756.043</b>	<b>80,11%</b>
		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	48.000.000	32.729.836	68,18 %
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	67.900.000	51.337.905	75,60 %
		Penyediaan Alat tulis Kantor	20.000.000	18.524.000	92,62 %
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19.490.000	12.581.000	64,55 %
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.000.000	2.348.000	33,54 %
		Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	3.000.000	2.640.000	88 %
		Penyediaan makanan dan minuman	30.000.000	20.513.549	68,37 %
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	80.000.000	73.993.000	92,49 %
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam	10.000.000	5.425.000	54,25 %

		daerah			
		Penyediaan Jasa Pelayanan perkantoran	46.966.000	28.245.710	60,14 %
		Penyediaan Jasa Pengamanan Gedung/ Kantor	92.995.200	92.417.832	99,37 %
<b>3.</b>	<b>Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>299.818.950</b>	<b>166.100.706</b>	<b>72,27%</b>
		a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	20.000.000	18.200.000	91 %
		b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	34.220.000	31.046.000	90,72 %
		c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	49.998.950	33.188.450	66,37 %
		d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	88.100.000	72.135.258	81,87 %
		e. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.500.000	2.500.000	100 %
		f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	35.000.000	9.031.000	25,80%

## 2. Analisa Efisiensi

Secara keseluruhan dari Belanja Langsung BKPSDM tahun 2019 hanya teralisasi 82,86 % dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp5.952.569.114,00 sehingga terdapat SILPA sebesar Rp1.020.191.691,00 atau sebesar 17,14 % hal ini disebabkan karena :

1. Efisiensi untuk belanja pada program Administrasi pelayanan perkantoran  
Anggaran Belanja pada Program Administrasi pelayanan perkantoran merupakan anggaran yang bersifat penyediaan dana guna tercukupinya kebutuhan rutin pelayanan perkantoran, sehingga penggunaannya juga menurut kebutuhan yang ada/ yang diperlukan.
2. Efisiensi karena tidak terlaksananya beberapa sub kegiatan, dari kegiatan:
  - a. Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS, khususnya untuk rekening Belanja kepesertaan yaitu untuk biaya Pelaksanaan Seleksi CAT (BKN) yang tidak dilaksanakan ditahun 2019. Pada Tahun 2019

Seleksi Penerimaan CPNS baru terlaksana pada tahap seleksi administrasi dan masa sanggah (sesuai jadwal dari Pusat)

- b. Kegiatan Seleksi Calon JPT, khususnya untuk belanja honorarium Pansel JPT Eselon Ila dan Biaya Assesment untuk calon peserta JPT Eselon Ila. Tidak terserapnya anggaran ini karena Seleksi Terbuka Calon JPT Eselon Ila (Sekda) tidak dapat diselesaikan di tahun berkenanaan karena peserta yang lolos seleksi tidak memenuhi syarat (5 pendaftar, lolos administrasi 2 orang).
- c. Kegiatan Pengiriman Diklat Teknis dan Fungsional PNS, khususnya untuk belanja biaya diklat bagi PPNS yang direncanakan dan dianggarkan sebanyak 5 orang, yang lolos seleksi hanya 3 orang dan pelaksanaan Diklat di BPSDMD Provinsi Jateng uang saku bagi peserta sudah ditanggung oleh BPSDMD Provinsi Jaeng sehingga dari Kabupaten Temanggung hanya mengeluarkan biaya untuk transportasi peserta.
- d. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah, Diklat Prajabatan bagi CPNS sudah dianggarkan untuk CPNS dari jalur umum dan dari jalur K2 (Bidan) dengan biaya kepesertaan Rp10.000.000,00/orang. Namun demikian ternyata biaya untuk Diklat Prajabatan bagi CPNS jalur K2 hanya dibutuhkan biaya sebesar Rp2.500.000,00/orang.
- e. Kegiatan Pengangkatan PNS, anggaran ini direncanakan untuk biaya operasional pengangkatan CPNS menjadi PNS formasi tahun 2018, namun demikian karena pada tahun 2019 belum dilaksanakan pengangkatan CPNS menjadi PNS, oleh karena itu anggaran tidak dimanfaatkan seluruhnya hanya sebagian kecil (25% dari anggaran yang tersedia) untuk pembiayaan konsultasi ke BKN.

### **C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia belum mendapatkan prestasi dan penghargaan dari instansi luar, namun demikian dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena hampir

keseluruhan target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori sangat baik.